

ABSTRAK

Mujahid, 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2015-2018. Pembimbing: (I) Dr. H. Fathurrahman Azhari., MHI (II) H. Abdul Gafur, Lc., MA.

Kata Kunci: *Dana desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat.*

Pengelolaan dana desa yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah desa tak jarang menimbulkan berbagai keraguan dan ketidakpercayaan dari sebagian masyarakat mengenai pengelolaan dana desa yang bersih dan akuntabel. Selain itu, Pemerintah pusat jelas mengharapkan bahwa pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa berjalan tertib dan taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercipta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar pada tahun 2015-2018 beserta realisasi penggunaan dana desa yang dilakukan melalui metode studi kasus dengan pertimbangan bahwa masalah yang muncul dalam penelitian bersumber dari gejala dan kenyataan di lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menemukan spesifikasi dan realita tentang pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Mekar Sari dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap program ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada beberapa informan terkait dan pengumpulan dokumen-dokumen terkait yang kemudian dianalisis dengan beracuan kepada teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2015-2018 telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang telah dirumuskan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan, namun pada tahap realisasinya di lapangan masih belum sepenuhnya tepat sasaran baik untuk program pembangunan desa maupun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga pada beberapa detail pelaksanaan program berpotensi menimbulkan kritik dari sebagian masyarakat. Menurut tinjauan *shariate enterprise theory*, dana desa diposisikan sebagai suatu amanah dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah desa agar digunakan sepenuhnya untuk mencapai tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa.